

OPINI

Berdamai dengan Kebenaran Peristiwa 1965

Yulius Dwi Cahyono MPd

Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

KEBOHONGAN meskipun lari secepat kilat pada akhirnya akan ketahuan juga. Istilah ini kiranya turut memberi warna dalam Tragedi Kemanusiaan 1965 yang dikenal dengan istilah G30S, yang kita peringati Rabu, 30 September 2015, hari ini. Tidak henti hentinya kontroversi Peristiwa 1965 terus diperbincangkan dan didiskusikan dalam seminar seminar, sebagai penanda bahwa kebenaran



■ Bersambung ke Hal 14

TribunOpini menerima kiriman artikel opini tentang beragam isu populer lokal, regional, maupun nasional. **TribunOpini** tayang setiap Selasa, Rabu, dan Jumat. Panjang artikel 3.000 karakter atau sekitar 525 kata. Kirim naskah via email : tribunopini@gmail.com, sertakan foto dan identitas diri

tidak akan pernah berhenti diperjuangkan. Pertanyaannya, apakah kita berani membuka hati untuk menerima kebenaran di balik peristiwa G30S?

Lima puluh tahun lalu, tepatnya pada pagi pagi buta 1 Oktober 1965, enam Perwira Tinggi Angkatan Darat, satu di antaranya Ahmad Yani, menjadi korban dalam suatu percobaan kudeta. Menurut versi Orde Baru, PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan tersebut. Peristiwa ini bermula dari munculnya isu adanya sekelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. PKI dan pasukannya dituduh menggerakkan militer untuk melakukan penculikan terhadap para perwira tersebut.

Di dalam ingatan kolektif masyarakat hingga kini masih tertanam begitu kuat bahwa dalam peristiwa 1965, PKI melakukan tindakan sadis dengan menculik,

menyiksa, dan membunuh para jenderal. Ingatan kolektif ini terpatrit kuat dalam ingatan melalui film dokumenter karya Arifin C Noer tahun 1984 berjudul "Pengkhianatan G30S/PKI". Film ini selalu diputar pada masa Orde Baru setiap 30 September malam dan diwajibkan ditonton oleh siswa mulai tingkat SD. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui film ini muncul agitasi kebencian kepada segelintir pihak yang diberi label antagonis (PKI dan Orang atau Kelompok yang dituduh sebagai simpatisan atau anggota PKI). Pada masa pemerintahan Habibie kewajiban tayang film tersebut dihentikan pada September 1998.

Kejagalan kejanggalan dan kekritisasi sejarawan kemudian bermunculan setelah Orde Baru tumbang. Situasi ini memutar balikkan 360 derajat sejarah G30S versi Orde Baru. Film baru karya Jhosua Openheimer berjudul *The Act of Killing* dan *The Look of Silence*, turut menjadi antitesis sejarah G30S versi Orde Baru.

Beredar dan diputarnya film ini sempat memicu aksi kekerasan dari sekelompok masa, antara lain, di UIN Sunan Kalijaga pada 11 Maret 2015 dan USD pada 25 Februari 2015.

Hal ini menandakan sebagian besar dari kita masih belum memahami sejarah dan belum mampu berdamai dengan kebenaran sejarah. Dalam penulisan sejarah baru peristiwa ini dimaknai penggulingan Presiden Soekarno dengan jalan menyingkirkan kelompok atau orang yang loyal kepada Soekarno.

Kedua film tersebut semakin membuka tabir gelap siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa ini, namun demikian bukan hal inilah yang paling utama, terdapat hal lain yang jauh lebih besar yaitu peristiwa genosida yang di luar batas perikemanusiaan melanda anak-anak bangsa pasca-1965. Genosida terhadap jutaan nyawa anak-anak bangsa ini jauh lebih sadis dari kejahatan PKI yang digambarkan dalam film

"Pengkhianatan G30S/PKI".

Melalui operasi penyingkiran PKI yang terorganisir banyak warga masyarakat (laki-laki atau perempuan) yang dituduh PKI atau dekat dengan PKI dieksekusi langsung, disiksa, diperkosa, ditangkap, dan ditahan untuk kemudian pada dini hari dieksekusi. Proses peradilan seakan akan tidak berlaku untuk mereka yang menjadi korban pembantaian massal. Dimanakah hak mereka untuk mendapat perlindungan hukum sebagai WNI?

Ketika kita menutup mata terhadap kebenaran sejarah dan selalu menghindari objektivitas sejarah, kita akan terkungkung dan jauh dari rasa kemanusiaan dan keadilan. Muncul sebuah pertanyaan: Pengkhianatan terhadap Pancasila terjadi dalam peristiwa 1965 atau justru terjadi pasca-1965? Sebuah refleksi bahwa Peristiwa G30S secara tidak langsung telah membabat habis pemimpin-pemimpin bangsa yang potensial setelah Soekarno. (*)